



Jurnal Berkala Fakultas Hukum
UNIVERSITAS GADJAH MADA

MIMBAR HUKUM

Volume 23, Nomor 1, Februari 2011

ISSN 0852-100X

IMPLEMENTING TREATIES IN MUNICIPAL COURTS

Wisnu Aryo Dewanto

KONSEP HAK SESEORANG ATAS TUBUH DALAM TRANSPLANTASI ORGAN
BERDASARKAN NILAI KEMANUSIAAN

Hwian Christianto

PERBEDAAN PENDAPAT DALAM PUTUSAN-PUTUSAN DI PENGADILAN NEGERI
YOGYAKARTA DAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN

Tata Wijayanta dan Hery Firmansyah

KEBEBASAN HAKIM PERDATA DALAM PENEMUAN HUKUM DAN ANTINOMI
DALAM PENERAPANNYA

Elisabeth Nurhaini Butarbutar

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA DALAM PENYIDIKAN DARI
KEKERASAN PENYIDIK DI KEPOLISIAN RESORT BANYUMAS

Agus Raharjo dan Angkasa

PERANAN KOORDINASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP
DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA LINGKUNGAN DI DIY

Herliana

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA MOTIF BATIK
TANJUNGBUMI MADURA

Devi Rahayu

DESENTRALISASI PENGUASAAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH
KAWASAN HUTAN DI JAWA: ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN

Subadi

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA
DI LUAR NEGERI

Lalu Husni

BERBAGAI BENTUK PENGAWASAN KEBIJAKAN DAERAH DALAM ERA
OTONOMI LUAS

Enny Nurbaningsih

PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN PENAHANAN MENURUT KUHP DAN
KONSEP RUU KUHP

Berlian Simarmata

ASPEK YURIDIS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN REMAJA

Muntaha

EKSISTENSI PEMILUKADA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN
DAERAH YANG DEMOKRATIS

Janpatar Simamora

Mimbar
Hukum

Vol.
23

No.
1

Hlm.
1-236

Yogyakarta
Februari 2011

ISSN
0852-100X

MIMBAR HUKUM

Jurnal Berkala Fakultas Hukum UGM
ISSN 0852-100X

Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tiga kali setahun
pada bulan Februari, Juni dan Oktober.
Volume 23, Nomor 1, Februari 2011

Ketua Dewan Penyunting

Andy Omara, S.H., M.Pub&Int.Law.

Wakil Ketua Dewan Penyunting

Anugrah Anditya, S.H., M.T.

Anggota Dewan Penyunting

Prof. Dr. Agustinus Supriyanto, S.H., M.Si.
Prof. Dr. Edward O.S. Hiariej, S.H., M.Hum.
Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum.

Penyunting Pelaksana

Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.
Sulastriyono, S.H., M.Si.
Yulkarnain Harahab, S.H., M.Si.
Herliana, S.H., M.Comm.Law.
Ari Hernawan, S.H., M.Hum.
Dina Widyaputri K., S.H., LL.M.
Fajar Winarni, S.H., M.Hum.

Staf Administrasi

Dian Agung Wicaksono, S.H.
Rizky Wirastomo

Alamat Sekretariat Mimbar Hukum: Gedung II Lantai I Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Jl. Sosio Justisia, No. 1 Bulaksumur, Yogyakarta 55281, Telepon/Fax. (0274) 512781, e-mail: hk-mimbar@ugm.ac.id.

MIMBAR HUKUM merupakan jurnal nasional terakreditasi berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 51/DIKTI/Kep/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang Hasil Akreditasi Jurnal Ilmiah. Penyunting menerima sumbangan tulisan berupa artikel hasil penelitian maupun artikel konseptual yang belum pernah diterbitkan dalam media lain. Ketentuan penulisan artikel dapat dilihat di halaman kulit dalam-belakang tentang "Syarat dan Ketentuan Penulisan".

MIMBAR HUKUM

Jurnal Berkala Fakultas Hukum UGM

ISSN 0852-100X

Volume 23, Nomor 1, Februari 2011

Halaman 1 - 236

DAFTAR ISI

<i>IMPLEMENTING TREATIES IN MUNICIPAL COURTS</i> <i>Wisnu Aryo Dewanto</i>	1 - 18
KONSEP HAK SESEORANG ATAS TUBUH DALAM TRANSPLANTASI ORGAN BERDASARKAN NILAI KEMANUSIAAN <i>Hwian Christianto</i>	19 - 37
PERBEDAAN PENDAPAT DALAM PUTUSAN-PUTUSAN DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA DAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN <i>Tata Wijayanta dan Hery Firmansyah</i>	38 - 60
KEBEBASAN HAKIM PERDATA DALAM PENEMUAN HUKUM DAN ANTINOMI DALAM PENERAPANNYA <i>Elisabeth Nurhaini Butarbutar</i>	61 - 76
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA DALAM PENYIDIKAN DARI KEKERASAN PENYIDIK DI KEPOLISIAN RESORT BANYUMAS <i>Agus Raharjo dan Angkasa</i>	77 - 97
PERANAN KOORDINASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA LINGKUNGAN DI DIY <i>Herliana</i>	98 - 114
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA MOTIF BATIK TANJUNGBUMI MADURA <i>Devi Rahayu</i>	115 - 131
DESENTRALISASI PENGUASAAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH KAWASAN HUTAN DI JAWA: ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN <i>Subadi</i>	132 - 149
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI <i>Lalu Husni</i>	150 - 167
BERBAGAI BENTUK PENGAWASAN KEBIJAKAN DAERAH DALAM ERA OTONOMI LUAS <i>Enny Nurbaningsih</i>	168 - 190
PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN PENAHANAN MENURUT KUHAP DAN KONSEP RUU KUHAP <i>Berlian Simarmata</i>	191 - 209
ASPEK YURIDIS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN REMAJA <i>Muntaha</i>	210 - 220
EKSISTENSI PEMILUKADA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG DEMOKRATIS <i>Janpatar Simamora</i>	221 - 236

IMPLEMENTING TREATIES IN MUNICIPAL COURTS

Wisnu Aryo Dewanto*

Abstract

In regard to the implementation of treaties in municipal courts, treaty is divided into self-executing and non-self-executing. A self-executing treaty is defined as a treaty that its implementation does not need an implementing legislation. However, a non-self-executing treaty needs an implementing legislation to have it enforced in national courts.

Abstrak

Terkait dengan implementasinya di pengadilan nasional suatu negara, perjanjian internasional digolongkan menjadi perjanjian internasional self-executing dan non-self-executing. Perjanjian internasional self-executing adalah perjanjian internasional yang dapat diimplementasikan secara langsung di pengadilan tanpa implementing legislation, dan perjanjian non-self-executing adalah perjanjian internasional yang tidak dapat langsung diimplementasikan di pengadilan tanpa adanya implementing legislation.

Keywords: *implementation, treaty, self-executing, non-self-executing, municipal court.*

A. Background

Treaties are utilized by international courts in resolving cases amongst States. However, treaties are also sometimes applied by judges in municipal courts in order to settle cases in regard to the rights and duties of individuals. In some States treaties are regarded as part of their national law. In other States, treaties are merely regarded as one of the legal sources for judges to solve disputes. Whether or not treaties can be directly implemented in States' municipal courts are determined largely by the doctrine of primacy of law. Theoretically in this regard, there are two major streams of jurisprudence,

namely monism and dualism. According to monism, international and national laws are solitary legal system which are inseparable; therefore if there is a conflict between these two legal rules, the international law will prevail. On the other hand, dualism reckons that international and national laws are two different and separate legal systems which exist in their own planes. In dualism, national laws and international laws will not conflict because the primacy of law is granted to the national laws.

Treaties, according to monist States, are directly incorporated into the States' legal systems therefore they can be directly

* Lecturer of International Law at Faculty of Law, Universitas Surabaya (e-mail: wisnu@ubaya.ac.id).